



## **PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI BERBASIS SISTEM WILAYAH UNTUK Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat**

**Tribuana Tungga Dewi**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Provinsi Nusa Tenggara Barat

### **Abstrak**

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi eksisting, permasalahan, serta arah pengembangan Kawasan Strategis Provinsi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis kebijakan dan analisis spasial terhadap dokumen RTRW, data pembangunan infrastruktur, serta kondisi sosial ekonomi wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar KSP di NTB mengalami ketimpangan antara pembangunan superstruktur ekonomi dengan infrastruktur dasar seperti air bersih, kesehatan, logistik, dan kelembagaan pengelolaan kawasan. Selain itu, ditemukan adanya interkoneksi permasalahan antar kawasan seperti konflik pemanfaatan air, kerusakan lingkungan akibat ekspansi agribisnis, serta ketergantungan ekonomi pada sektor tunggal seperti pertambangan. Arah pengembangan KSP di NTB perlu difokuskan pada penguatan infrastruktur dasar, penguatan kelembagaan kawasan, integrasi pembangunan antar kawasan, serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan berbasis daya dukung lingkungan. Pengembangan KSP tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

**Kata Kunci:** Kawasan Strategis Provinsi, Infrastruktur, Penataan Ruang, Pembangunan Wilayah, Nusa Tenggara Barat.

### **PENDAHULUAN**

Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi berbasis sistem

wilayah merupakan salah satu pendekatan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan karena

\*Correspondence Address : [tribhuanafarid83@gmail.com](mailto:tribhuanafarid83@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v13i4.2026.986-995

© 2026UM-Tapsel Press

pengembangan kawasan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi kawasan (Kurnianingsih et al., 2024), tetapi juga memperhatikan keterkaitan antar wilayah, pemerataan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, serta keberlanjutan lingkungan hidup (Hirsan et al., 2022).

Pengembangan wilayah merupakan salah satu strategi untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Sulistya, 2025). Dalam teori pengembangan wilayah, pembangunan tidak terjadi secara merata tetapi melalui pusat-pusat pertumbuhan yang berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi wilayah sekitarnya (Thahir, 2023). Konsep ini dikenal sebagai teori *growth pole* yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi cenderung terkonsentrasi pada wilayah tertentu yang memiliki keunggulan sumber daya, infrastruktur, dan investasi, kemudian menyebar ke wilayah sekitarnya melalui efek penyebaran (*spread effect*) yang simultan (Dobrescu & Mihaela, 2014).

Kawasan Strategis merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan (Kurniawan & Lionardo, 2025). Kawasan strategis dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah yang mendorong perkembangan wilayah sekitarnya melalui jaringan ekonomi, transportasi, dan sistem perkotaan (Muazir, 2019).

Kawasan strategis berbasis sistem kewilayahan merupakan pendekatan penataan ruang yang memprioritaskan pengembangan area tertentu berdasarkan potensi ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, atau lingkungan, dengan keterkaitan erat antarwilayah (Rudiyanto et al., 2016). Pendekatan ini bertujuan menciptakan

pertumbuhan ekonomi yang seimbang, mengurangi disparitas antarwilayah, serta memastikan pembangunan infrastruktur lebih terpadu dan efisien (Tommy Firman, 1992).

Dalam pengembangan kawasan strategis, infrastruktur memiliki peran yang sangat penting karena dapat meningkatkan konektivitas wilayah, menurunkan biaya transportasi, meningkatkan investasi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah (Mardiansjah et al., 2018). Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan daya saing wilayah dan mempercepat perkembangan ekonomi regional (Shkarlet et al., 2021).

Teori pengembangan wilayah menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah dipengaruhi oleh faktor lokasi, aglomerasi ekonomi, infrastruktur, inovasi, dan jaringan ekonomi antar wilayah. Teori pengembangan wilayah modern menggabungkan teori lokasi, teori aglomerasi, teori pertumbuhan endogen, dan teori ekonomi regional yang menekankan pentingnya infrastruktur, inovasi, dan konektivitas wilayah dalam pembangunan regional (Nijkamp & Maria Abreu, 2009). Sedangkan teori *growth pole* menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak terjadi secara merata tetapi terpusat pada wilayah tertentu yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Wilayah tersebut memiliki industri unggulan, infrastruktur, investasi, dan aktivitas ekonomi yang tinggi sehingga mampu mendorong pertumbuhan wilayah di sekitarnya. Kawasan strategis dapat berfungsi sebagai *growth pole* dalam pengembangan wilayah provinsi atau nasional (Dobrescu & Mihaela, 2014). Strategi *growth pole* banyak digunakan dalam kebijakan pembangunan wilayah di berbagai negara untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi regional. Namun

jika tidak direncanakan dengan baik, growth pole dapat menyebabkan ketimpangan wilayah karena pembangunan hanya terpusat pada wilayah tertentu (Frick & Andrés Rodríguez-Pose, 2025).

Salah satu upaya dalam mempercepat pertumbuhan kawasan strategis dan interkoneksi fungsional keseluruhannya adalah dengan interasi infrastruktur. Infrastruktur merupakan salah satu faktor utama dalam pengembangan wilayah karena infrastruktur dapat meningkatkan aksesibilitas, mobilitas barang dan jasa, investasi, serta pertumbuhan ekonomi wilayah. Infrastruktur juga berperan dalam meningkatkan integrasi wilayah dan mempercepat pembangunan kawasan strategis (Shkarlet et al., 2021). Pembangunan infrastruktur harus terintegrasi dengan perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah agar pembangunan infrastruktur dapat mendukung pembangunan ekonomi dan lingkungan secara berkelanjutan (Firmanto et al., 2022).

Namun pengembangan wilayah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perencanaan tata ruang dan pembangunan wilayah harus memperhatikan daya dukung lingkungan, sumber daya alam, dan keberlanjutan pembangunan wilayah (Anhar Drakel, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, pengembangan Kawasan Strategis Provinsi di Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan secara terintegrasi antara pengembangan ekonomi, infrastruktur wilayah, dan lingkungan hidup agar pembangunan kawasan strategis tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga pembangunan wilayah yang

berkelanjutan (Hartawan & Ruwaidah, 2017).

Pendekatan sistem wilayah memungkinkan integrasi antara sistem infrastruktur, sistem ekonomi wilayah, sistem lingkungan hidup, dan sistem kelembagaan wilayah sehingga pembangunan kawasan strategis dapat dilakukan secara lebih efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan (Setiadi et al., 2021).

## METODE PENELITIAN

Kajian ini Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan pengembangan wilayah dan perencanaan tata ruang (Nasriaty, 2016). Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis kondisi eksisting kawasan strategis, permasalahan pengembangan kawasan, interkoneksi antar kawasan strategis, serta merumuskan model pengembangan Kawasan Strategis Provinsi berbasis infrastruktur dan sistem wilayah (Rakasiwi et al., 2025).

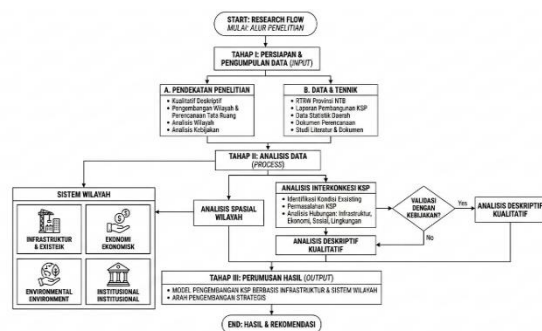
Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis wilayah / *regional analysis* (Rijal, 2025) dan analisis kebijakan / *policy analysis* (Aznur, 2021) karena penelitian berkaitan dengan perencanaan wilayah, kebijakan tata ruang, dan pengembangan kawasan strategis (Rudiyanto et al., 2016).

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang bersumber dari dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, laporan pembangunan kawasan strategis, data statistik daerah, serta dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan studi dokumen perencanaan wilayah. Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif, analisis spasial wilayah, serta analisis interkoneksi antar kawasan strategis. Analisis interkoneksi digunakan untuk

mengidentifikasi hubungan antara permasalahan infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lingkungan antar Kawasan Strategis Provinsi (Karim et al., 2023).

Tahapan penelitian meliputi identifikasi Kawasan Strategis Provinsi, analisis potensi dan permasalahan setiap kawasan, analisis keterkaitan antar kawasan, serta perumusan arah pengembangan kawasan strategis berbasis infrastruktur dan lingkungan.



**Gambar 1.** Alur Metode Penelitian (sumber : Olahan Penulis, 2026)

Nusa Tenggara, berbatasan dengan Bali di sebelah barat dan Nusa Tenggara Timur di sebelah timur. Provinsi ini memiliki potensi yang cukup beragam, dari hadirnya destinasi wisata kelas dunia, hingga beragamnya sumberdaya alam dan hayatinya yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.



**Gambar 2.** Orientasi Lokasi Prov. NTB (sumber : Olahan Penulis, 2026)

Selanjutnya, dilakukan penentuan alternatif kebijakan dalam pengembangan KSP di NTB, yang fokus, terpadu, dan adaptif yang meninggalkan pola pembangunan konvensional (*business as usual*) demi mengatasi tantangan ganda pertumbuhan ekonomi dan ketangguhan lingkungan (Amrulloh et al., 2022). Inti dari metodologi ini adalah Analisis Interkoneksi Masalah yang secara mendalam mengidentifikasi hubungan timbal balik antara permasalahan empiris lintas kawasan. Seluruh proses ini didukung secara teknis melalui metode inventarisasi dan evaluasi sumber daya lahan berbasis geospasial, guna mentransformasikan visi strategis RTRW menjadi dokumen operasional.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Lokasi kajian berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Kepulauan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan 11 Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di luar sektor pertambangan. Kawasan-kawasan ini diprioritaskan dalam penataan ruang karena memiliki pengaruh penting terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan di tingkat provinsi.

Penetapan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di Nusa Tenggara Barat memiliki peran krusial sebagai instrumen pengendalian dan pemanfaatan ruang untuk mencapai target pembangunan daerah. Secara umum, KSP berfungsi untuk memprioritaskan penataan ruang pada wilayah yang memiliki pengaruh sangat penting terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dalam lingkup provinsi. Pengembangan KSP ini bertujuan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,

meningkatkan pariwisata, serta mendukung visi NTB EMAS 2045.

Berdasarkan karakteristik dan fungsi kawasan, Kawasan Strategis Provinsi di NTB dapat dibagi menjadi tiga tipologi utama:

1. Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi, yang terdiri dari:

- Mataram Raya
- Kuta Mandalika
- Industri Sumbawa Barat
- SAMOTA
- Teluk Bima
- Agribisnis Poto Tano

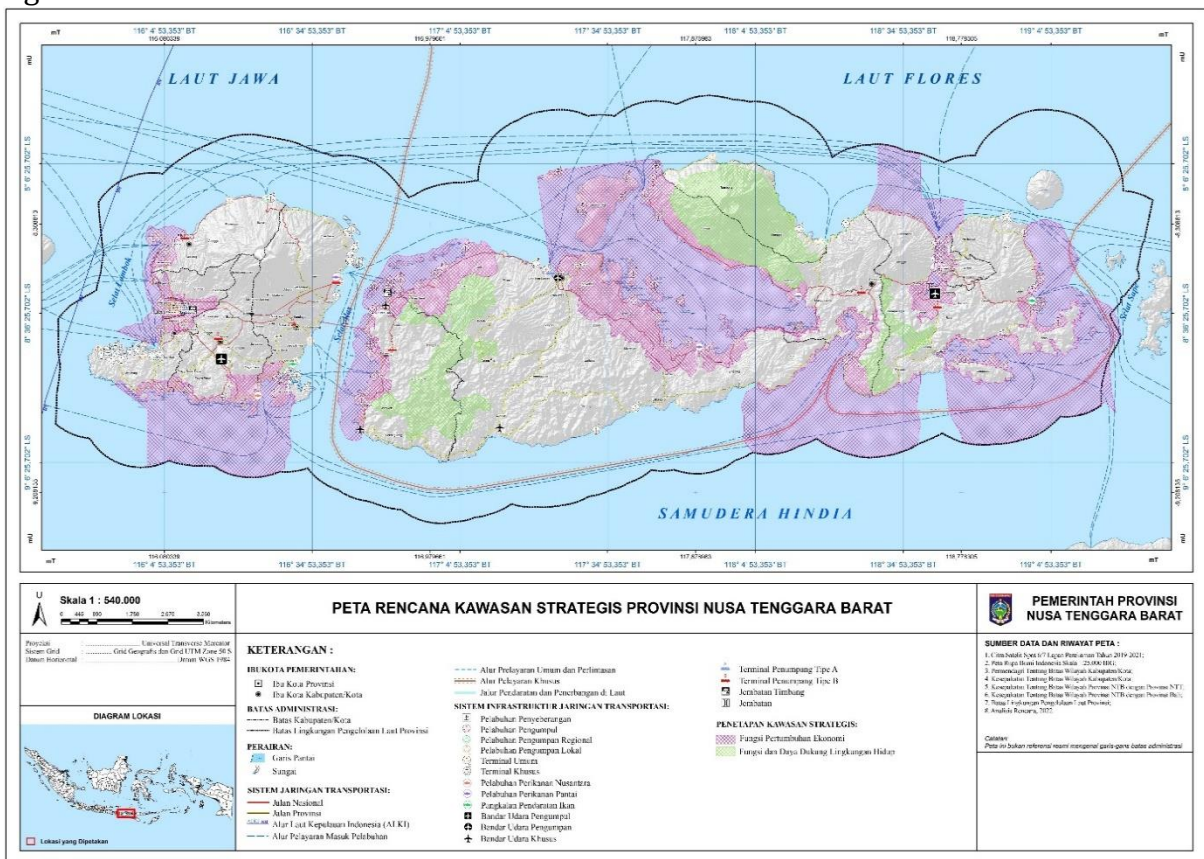
2. Kawasan Strategis Agribisnis dan Perikanan

- Teluk Cempi Hu'u
- Waworada Sape

3. Kawasan Strategis Fungsi Lingkungan Hidup

- Ekosistem Tambora
- Ekosistem Parado
- Ekosistem Puncak Ngengas Selalu Legini

Setiap tipologi kawasan memiliki karakteristik permasalahan yang berbeda sehingga memerlukan strategi pengembangan yang berbeda.



Gambar 3. Sebaran Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di Provinsi NTB (sumber : Perda No. 5/2024, tentang RTRW Prov NTB 2024-2044)

Berdasarkan hasil analisis wilayah dan dokumen perencanaan, permasalahan utama pengembangan Kawasan Strategis Provinsi di NTB meliputi:

1. Ketimpangan Infrastruktur Dasar

Sebagian besar kawasan strategis berkembang pada sektor ekonomi seperti pariwisata, industri, dan pertanian, namun belum diimbangi dengan infrastruktur dasar seperti:

- Air bersih
- Sanitasi
- Persampahan

- Fasilitas kesehatan
- Pendidikan
- Transportasi lokal
- Logistik

Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**2. Konflik Sumber Daya Air**

Beberapa kawasan strategis seperti Mandalika, Mataram Raya, dan kawasan agribisnis mengalami konflik pemanfaatan air antara:

- Pariwisata
- Pertanian
- Permukiman
- Industri

Konflik air menjadi salah satu isu strategis terbesar dalam pengembangan wilayah NTB.

**3. Kerusakan Lingkungan**

**Tabel 1 Rangkuman Permasalahan Utama KSP di Prov. NTB**

No	Kawasan Strategis	Potensi Utama	Permasalahan Utama	Arahan Pengembangan
1	Kawasan Mataram Raya-Tiga Gili dan Sekitarnya	Pariwisata, Perdagangan, Jasa	Krisis air bersih, banjir, sampah	Sistem penyediaan air regional, pengendalian banjir, pengelolaan persampahan
2	Kawasan Kuta dan Mandalika dan Sekitarnya	Pariwisata Internasional	Konflik air, kerusakan lingkungan	Sistem air baku, pengendalian tata ruang, pariwisata berkelanjutan
3	Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya	Pertambangan, Smelter	Ketergantungan sektor tambang	Diversifikasi ekonomi, pengembangan kawasan industri
4	Kawasan Agribisnis Poto Tano-Alas-Utan dan Sekitarnya	Jagung, Peternakan	Fluktuasi harga, logistik	Pengolahan hasil pertanian, pelabuhan logistik
5	Kawasan Teluk Saleh - Moyo - Tambora (SAMOTA) dan Sekitarnya	Peternakan, Perikanan, Pariwisata	Kelembagaan kawasan	Badan pengelola kawasan
6	Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya	Perikanan, Perkotaan	Limbah kota, sedimentasi	Pengelolaan DAS dan limbah perkotaan
7	Kawasan Waworada - Sape dan Sekitarnya	Perikanan, Garam	Infrastruktur terbatas	Pelabuhan perikanan dan jalan kawasan
8	Kawasan Teluk Cempi-Hu'u dan Sekitarnya	Perikanan, Pariwisata	Infrastruktur dan akses	Jalan kawasan dan pelabuhan
9	Kawasan Ekosistem Gunung Tambora	Hutan, Ekowisata	Deforestasi	Konservasi dan rehabilitasi hutan
10	Kawasan Ekosistem Hutan Parado	Hutan dan Pertanian	Erosi dan banjir	Konservasi lahan

Ekspansi pertanian jagung, pertambangan, dan pembangunan pariwisata menyebabkan:

- Deforestasi
- Erosi
- Sedimentasi teluk
- Penurunan kualitas air
- Banjir dan kekeringan

Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan kawasan belum sepenuhnya berbasis daya dukung lingkungan.

**4. Kelembagaan Pengelolaan Kawasan**

Beberapa kawasan strategis seperti SAMOTA dan Teluk Bima melibatkan beberapa kabupaten/kota sehingga memerlukan kelembagaan khusus pengelolaan kawasan. Namun hingga saat ini kelembagaan tersebut belum berjalan optimal.

11	Kawasan Ekosistem Puncak Ngengas Selalu Legini	Kawasan Lindung	Kerusakan hutan	Perlindungan kawasan lindung
----	--	-----------------	-----------------	------------------------------

Sumber : Hasil Analisis dan Olahan Penulis, 2026

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya interkoneksi permasalahan antar Kawasan Strategis Provinsi. Interkoneksi tersebut meliputi:

1. Interkoneksi Hulu–Hilir Lingkungan

Kerusakan hutan di kawasan Tambora berdampak pada:

- Banjir di kawasan hilir
- Sedimentasi Teluk Bima
- Kerusakan kawasan pesisir
- Penurunan produksi perikanan

2. Interkoneksi Ekonomi Wilayah

Kawasan industri, pertanian, dan pariwisata saling terhubung dalam sistem ekonomi wilayah:

- Kawasan pertanian menyuplai bahan baku
- Kawasan industri mengolah
- Kawasan pelabuhan dan kota mendistribusikan
- Kawasan pariwisata menjadi pasar

3. Interkoneksi Infrastruktur

Pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, bendungan, dan jaringan air bersih tidak hanya mempengaruhi satu kawasan, tetapi beberapa kawasan sekaligus. Oleh karena itu, pengembangan Kawasan Strategis Provinsi harus dilakukan dengan pendekatan sistem wilayah, bukan per kawasan secara terpisah.

Model pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di NTB menerapkan pendekatan sistem wilayah yang mengintegrasikan infrastruktur, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan dalam satu kesatuan yang tidak

terpisahkan. Strateginya berfokus pada penguatan pusat pertumbuhan, konektivitas antarwilayah, dan penyediaan infrastruktur dasar yang selaras dengan daya dukung lingkungan serta mitigasi bencana. Dengan menekankan tata kelola kelembagaan yang kuat dan integrasi pembangunan hulu-hilir berbasis potensi lokal, model ini memastikan pengembangan kawasan dilakukan secara holistik dan terpadu untuk menghindari pendekatan yang bersifat parsial.



Gambar 4. Digram Model Keterkaitan Sistem KSP (sumber : hasil Olahan Penulis, 2026)

Dengan mempertimbangan penanganan permasalahan, mengkaji interkoneksi antar wlayah dan pengembangan model sederhana bagi kebijakan penanganan KSP di Provinsi NTB, maka dirumuskan tiga alternatif pilihan kebijakan utama untuk pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di Nusa Tenggara Barat (NTB) periode jangka menengah, yaitu sebagai berikut:

**Alternatif I:** Penataan Pondasi dan Dokumen Teknis. Kebijakan ini berfokus pada penguatan aspek legal dan perencanaan dasar sebelum investasi besar dilakukan. Kegiatan utamanya meliputi:

- Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) prioritas untuk kawasan Kuta-Mandalika, SAMOTA, 3 Gili, Sumbawa Barat, dan Pototano–Alas-Utan.

- Pembaruan (Updating) Masterplan KSP 2025–2045 serta pelaksanaan survei geospasial dan environmental baseline di setiap kawasan.

- Identifikasi titik-titik infrastruktur kritis dan penetapan kawasan prioritas tahunan.

- Penyusunan program unggulan kawasan yang mencakup pengembangan pariwisata, klaster industri, manajemen konservasi, dan pengembangan agropolitan.

**Alternatif II:** Pembangunan Infrastruktur Dasar & Aksesibilitas. Kebijakan ini menitikberatkan pada pembangunan fisik untuk mendukung mobilitas, layanan dasar, dan pemulihan lingkungan:

- Pembangunan dan pelebaran jalan strategis, termasuk akses Mandalika, jalan Pototano–Alas-Utan, jalan lingkar SAMOTA, dan akses menuju Parado–Tambora.

- Peningkatan fasilitas dermaga dan pelabuhan perikanan di Teluk Cempi, Hu’u, dan Teluk Bima.

- Penyediaan infrastruktur air bersih dan energi untuk kawasan industri Sumbawa Barat serta pembangunan pusat pelayanan wisata (tourism hub) di 3 Gili dan SAMOTA.

- Rehabilitasi ekosistem yang mencakup 300 ha mangrove di SAMOTA, 200 ha hutan di Parado, dan 50 ha savana di Tambora.

- Penyediaan jaringan telekomunikasi 5G untuk kawasan Mandalika dan 3 Gili.

**Alternatif III:** Pengembangan Kawasan & Ekosistem Ekonomi. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi pada

sektor-sektor unggulan, dengan fokus pada pengembangan pariwisata unggulan di Mandalika, 3 Gili, SAMOTA, Teluk Cempi, Hu’u, Teluk Bima, dan Tambora.

Untuk mendukung keberhasilan alternatif tersebut, terdapat beberapa kebijakan tambahan berupa :

- Kebijakan Lingkungan

Penerapan prinsip carrying capacity (daya dukung) dan environmental limit pada kawasan wisata premium dan konservasi. Selain itu, diperlukan skema Payment for Ecosystem Services (PES) atau Pembayaran Jasa Lingkungan untuk membiayai perlindungan di kawasan hulu.

- Kebijakan Ekonomi

Memberikan insentif fiskal dan nonfiskal untuk hilirisasi mineral di Sumbawa Barat dan sektor agro-maritim di Woworada-Sape.

- Kebijakan Sosial

Pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelatihan kompetensi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri (seperti operasional smelter atau wisata premium).

- Kebijakan Kelembagaan

Membentuk Unit Manajemen Kawasan (UMK) atau Badan Otorita untuk setiap KSP guna mengoordinasikan investasi, teknis, dan pengawasan

## **SIMPULAN**

Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menghadapi berbagai permasalahan seperti ketimpangan infrastruktur dasar, konflik pemanfaatan sumber daya air, kerusakan lingkungan, serta lemahnya kelembagaan pengelolaan kawasan strategis. Selain itu, terdapat interkoneksi permasalahan antar kawasan strategis terutama terkait sistem lingkungan hulu–hilir, sistem

ekonomi wilayah, dan sistem infrastruktur wilayah.

Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi di masa depan harus dilakukan dengan pendekatan sistem wilayah yang terintegrasi melalui penguatan infrastruktur dasar, konektivitas antar kawasan, penguatan kelembagaan pengelolaan kawasan, serta penerapan pembangunan berkelanjutan berbasis daya dukung lingkungan. Kawasan Strategis Provinsi tidak hanya berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan pembangunan wilayah dan pelestarian lingkungan hidup.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amrulloh, A., Jumiaty, I. E., & Yulianti, R. (2022). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Daerah Banten Lama. *JIPAGS ( Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 6(2), 81–92.
- Anhar Drakel. (2024). Konsep Pembangunan Tata Ruang, Infrastruktur, Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Suatu Studi Wilayah Perkotaan). *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi (JUPEK)*, 6(1), 58–69.
- Aznur, T. Z. (2021). Analisis Daya Saing Dan Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Komoditas Kelapa Sawit Rakyat. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(1), 69–77.
- Dobrescu, E. M., & Mihaela, E. (2014). Theories regarding the role of the growth poles in the economic integration. *Procedia Economics and Finance*, 8(14), 262–267. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(14\)00089-6](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00089-6)
- Firmanto, T., Ridwan, Gufran, Didik Irawansyah, & Ahab Mardiansjah. (2022). Policy On Spatial Planning And Regional Development Based On Sustainable Development In Bima. *The Indonesian Journal of Legal Thought ( IJLETH )*, 2(1), 26–34.
- Frick, S., & Andrés Rodríguez-Pose. (2025). Lessons-learned from growth pole strategies in the developing world. *Progress Planning*, 195.
- Hartawan, T., & Ruwaidah, E. (2017). Kajian Lingkungan Hidup Strategis Terhadap Penataan Ruang di Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Senggigi Tiga Gili. *Jurnal Sangkareang Mataram*, 3(3), 58–65.
- Hirsan, F. P., Kurniawan, A., & Yuniarman, A. (2022). Model Konstruksi Ruang Kecamatan Sekarbela Berdasarkan Interaksi Ruang Menggunakan Near Neighbourhood Analysis & Space Syntax. *Geodika*, 6(2), 163–174. <https://doi.org/10.29408/geodika.v6i2.6080>
- Karim, T. Z., Harahap, H. H., & Mardalena, M. (2023). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah Dalam Upaya Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Jambi. *Journal of Business Finance and Economic (JBFE)*, 4(2).
- Kurnianingsih, N. A., Verlina Agustine, & Lestari P. Winata. (2024). Analisis Sistem Pusat Kewilayahan Kabupaten Lampung Selatan. *Plano Madani*, 13(2), 252–262.
- Kurniawan, A., & Lionardo, A. (2025). Model Tata Kelola Kolaboratif dalam Implementasi Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Musi Banyuasin. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 7(2), 105–115. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v7i2.6607>
- Mardiansjah, F. H., Handayani, W., & Setyono, J. S. (2018). Pertumbuhan Penduduk Perkotaan dan Perkembangan Pola Distribusinya pada Kawasan Metropolitan Surakarta. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 6(3), 215. <https://doi.org/10.14710/jwl.6.3.215-233>
- Muazir, S. (2019). Interaksi Wilayah di Kawasan Strategis Nasional ( Perbatasan ) dalam Kerangka Jaringan Perkotaan. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 7(April), 1–13. <https://doi.org/10.14710/jwl.7.1.1-13>.
- Nasriaty. (2016). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Mamuju Utara. *E-Jurnal Katalogis*, 4(5), 98–108.
- Nijkamp, P., & Maria Abreu. (2009). *REGIONAL DEVELOPMENT THEORY*.
- Rakasiwi, K., Rahman, A., Pratiwi, L., & Paisal, M. (2025). Model Perencanaan Tata Ruang Partisipatif untuk Pengembangan Heritage Education Tourism di Situs Cagar Budaya Kota Kapur Kabupaten Bangka. *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)*, 5(4), 2967–2978.

Rijal, S. (2025). Leading Sector Analysis of Regional Economic Growth. *International Journal of Technology and Education Reserarch (IJETER)*, 03(02), 207–221.

Rudiyanto, A., Hussein, U. M., Tambunan, R., Apriyana, N., Amalia, M., Yulianti, S., Noor, R., Ciptadi, E. Y., Cholifihani, M., & Rahayu, N. H. (2016). *Kajian Telaah Kritis Penetapan Kawasan Strategis Dalam RPJMN & RTRWN*.

Setiadi, R., Yesiana, R., Mardiansjah, F. H., Nur, S., & Kusuma, A. (2021). Kajian Strategis Kelitbangan Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah Kota Semarang Tahun 2021-2026. *Jurnal RIPTEK*, 15(2), 19–27.

Shkarlet, S., Ivanova, N., Popelo, O., Dubyna, M., & Zhuk, O. (2021). Infrastructural and Regional Development : Theoretical Aspects and Practical Issues. *Estudios de Economia Aplicada*, 20(1), 1–11.

Sulistya, I. E. (2025). Penentuan Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Analisis Interaksi Spasial Antarwilayah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 63–78. <https://doi.org/10.33005/jdep.v8i1.712>

Thahir, B. (2023). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah di Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(1), 102–115. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i1.3133>

Tommy Firman. (1992). Studi Penataan Ruang Kawasan-kawasan Strategis. *Jurnal PWK*, 3(1), 54–57.